

# PROFIL INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA

2017

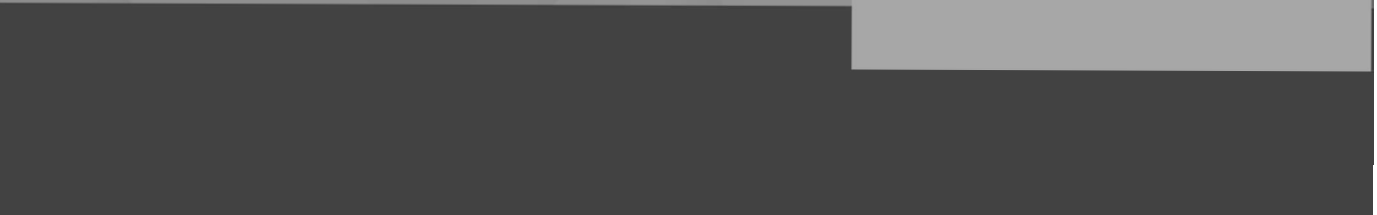


# PROFIL INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA

2017



VOTE



**Profil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)**

**Provinsi Sumatera Utara 2017**

**ISSN: 2620-5696**

**No. Publikasi: 12520.1806**

**Katalog BPS: 4601006.12**

**Ukuran Buku: 18,2 cm x 25,7 cm**

**Jumlah Halaman: x + 33 Halaman**

**Naskah:**

**Bidang Statistik Sosial**

**Penyunting:**

**Bidang Statistik Sosial**

**Gambar Kulit:**

**Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik**

**Diterbitkan oleh:**

**©Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara**

**Dicetak oleh:**

**CV. Rilis Grafika**

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau  
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin  
tertulis dari Badan Pusat Statistik**

**Tim Penyusun**

**Profil Indeks Demokrasi Indonesia  
Sumatera Utara 2017**

**Penanggung Jawab Umum :**  
Dr.Syech Suhaimi,SE,M.Si

**Editor dan Penanggung Jawab:**  
Mukhamad Mukhanif S.Si, M.Si  
Panca Cahyo, S.ST,M.Si

**Penulis:**  
Dahril Iskandar

**Desain Kover & Infografis:** Brian Firdian, SST

<https://sumut.bps.go.id>



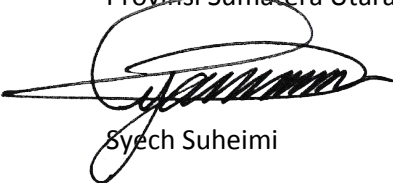
Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat menerbitkan Publikasi Profil Indeks Demokrasi Indonesia Sumatera Utara 2017.

IDI merupakan alat ukur perilaku berdemokrasi pemerintah dan masyarakat mengandalkan pada data empiris, mendasarkan pada peristiwa yang diamati dan terukur. BPS instansi yang dipercaya untuk mengumpulkan dan mengolah data dan diverifikasi bersama dengan Dewan ahli IDI, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopluhukam), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), United Nations Development Programme (UNDP).

IDI 2017 mencatat peristiwa dan perilaku berdemokrasi sepanjang 2017. Publikasi Profil Indeks Demokrasi (IDI) Indonesia Provinsi Sumatera Utara 2017 mencakup data hasil penghitungan IDI 2009 s.d 2017.

Kami berharap publikasi ini dapat menjadi acuan pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan perilaku yang berkarakter Pancasila dan berwawasan kebangsaan untuk pencapaian nilai-nilai demokrasi.

Medan, September 2018  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Sumatera Utara



Syech Suheimi



## Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Grafik	viii
Landasan Konseptual	ix
Indeks Demokrasi Indonesia	1
1. Komponen Penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia	1
2. Metode Pengumpulan Data Indeks Demokrasi Indonesia	2
3. Makna Nilai Indeks Demokrasi Indonesia	3
4. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Utara 2016 – 2017	4
5. Perkembangan Indeks Aspek IDI Sumatera Utara 2016 – 2017	5
6. Perkembangan Indeks Variabel IDI Sumatera Utara 2016 - 2017	9
7. Perkembangan Skor Indikator IDI Sumatera Utara 2016 – 2017	16
8. Capaian Indikator IDI Sumatera Utara 2017	23
Lampiran	17



## Daftar Grafik

1. Perkembangan IDI Sumatera Utara, 2009-2017	5
2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Sumatera Utara, 2009-2017	6
3. Perubahan Indeks Variabel Aspek Lembaga Demokrasi IDI Sumatera Utara 2017 dibanding 2016	7
4. Perubahan Indeks Variabel Aspek Kebebasan Sipil IDI Sumatera Utara 2017	8
5. Perubahan Indeks Variabel Aspek Hak Hak Politik IDI Sumatera Utara 2017 dibanding 2016	9
6. Perkembangan Indeks Variabel IDI Sumatera Utara, 2016-2017	10
7. Perubahan Indeks Variabel IDI Sumatera Utara 2017 dibanding 2016	11
8. Perubahan Indeks Indikator menurut Variabel yang Mengalami Penurunan dibanding 2016 pada IDI Sumatera Utara 2017	13
9. Perubahan Indeks Indikator menurut Variabel yang Mengalami Peningkatan dibanding 2016 pada IDI Sumatera Utara 2017	15
10. Perubahan Indeks Indikator Aspek Kebebasan Sipil IDI Sumatera Utara 2017 dibanding 2016	17
11. Perubahan Indeks Indikator Aspek Hak Hak Politik IDI Sumatera Utara 2017 dibanding 2016	19
12. Perubahan Indeks Indikator Aspek Lembaga Demokrasi IDI Sumatera Utara 2017 dibanding 2016	22
13. Nilai Skor Indikator IDI Sumatera Utara 2016 - 2017	33

## Landasan Konseptual

1

Indonesia sekarang dinilai oleh dunia sebagai sebuah negara demokrasi, sejak *Freedom House* (2008), memasukan Indonesia kedalam kelompok negara-negara “bebas secara penuh” di dunia, didasarkan atas “indeks kebebasan”.

2

Indonesia adalah sebuah negara besar dengan tingkat keragaman yang besar pula, apakah itu dalam pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, tingkat ketimpangan pendapatan, penegakan hukum, konflik komunal, dan lain-lain. Karena itu, menjadi sangat relevan untuk berpikir tentang keragaman capaian demokrasi antar provinsi di Indonesia dari waktu ke waktu, dan kemudian dikaitkan dengan faktor-faktor tersebut untuk pembuatan rencana pembangunan politik dan demokrasi di semua provinsi dan juga kabupaten dan kota di Indonesia.


3

Dalam konteks itulah Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menjadi krusial, sebagai alat ukur empirik dan sederhana untuk menilai kemajuan atau kemunduran demokrasi di provinsi-provinsi di tanah air. Untuk tujuan itu maka menjadi sangat fundamental memahami apa yang dimaksud “demokrasi” itu sendiri. Dari pengertian atau definsi ini, kemudian dapat diturunkan dimensi-dimensinya dan kemudian varabel-variabel dan indikator-indikatornya.

Dengan teknik pembuatan indeks dari indikator-indikator itu akan terbentuk IDI yang dapat diturunkan hingga tingkat provinsi di tanah air



IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia



IDI adalah *Fact-Based Information*, bagian dari upaya mengembangkan *a culture of evidence-based decision making*, yang sesuai deklarasi dunia tentang statistik di Istanbul, Turki 2008



Setiap angka IDI mempunyai makna yang terkandung di balik semua indikator yang digunakan

## Indeks Demokrasi Indonesia

Mengukur perkembangan demokrasi bukanlah pekerjaan yang mudah karena luasnya pengertian demokrasi sehingga mencakup sejumlah besar objek. Oleh karena itu perlu dilakukan penentuan komponen-komponen demokrasi apa saja yang datanya akan dikumpulkan sehingga komponen yang lain tidak diperhatikan. Untuk mengkuantifikasikan perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia, disusunlah sebuah indikator yakni Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang berupa kumpulan angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia berdasarkan beberapa aspek demokrasi yakni kebebasan sipil (*civil liberties*), hak-hak politik (*political rights*), dan lembaga-lembaga demokrasi (*institutions of democracy*). Ketiga aspek demokrasi ini kemudian dijabarkan menjadi 11 variabel dan 28 indikator.

Dengan disusunnya indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi disetiap provinsi berdasarkan ketiga aspek yang dipelajari. Disamping itu, indeks perkembangan demokrasi di satu daerah juga dapat dibandingkan dengan daerah lainnya untuk memperoleh gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi di Indonesia.

### 1. Komponen Penghitungan IDI

Dengan mempertimbangkan dimensi teoritis dan empiris tentang demokrasi, maka pada konteks penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), disepakati ada 3 (tiga) aspek utama yang dijadikan sebagai objek kajian. Tiga aspek yang dimaksud adalah: Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak Politik (*Political Rights*), dan Institusi Demokrasi (*institution of demokrasi*). Aspek pertama dan kedua merefleksikan esensi utama dari konsep demokrasi. Namun demikian, mengingat dua esensi dasar dari demokrasi tersebut (*civil liberties dan political rights*) tidak mungkin dapat bekerja secara maksimal tanpa adanya wadah, struktur dan prosedur pendukung, maka cukup beralasan bila kemudian institusi demokrasi (*institution of demokrasi*) juga harus diartikulasi sebagai bagian dari aspek penting demokrasi. Atas dasar pertimbangan inilah, maka dalam penyusunan IDI, institusi demokrasi, telah didudukkan sebagai aspek ketiga.

Adapun secara lengkap Aspek, Variabel dan Indikator dari Penyusunan IDI ditampilkan pada tabel 1.

Tabel 1. Komponen Penghitungan IDI 2009 - 2017

ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR
<b>Kebebasan Sipil</b> 	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	2 indikator
	2. Kebebasan BeroPendapat	2 indikator
	3. Kebebasan Berkeyakinan	3 indikator
	4. Kebebasan dari Diskriminasi	3 indikator
<b>Hak-Hak Politik</b> 	5. Hak Memilih dan Dipilih	5 indikator
	6. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	2 indikator
<b>Lembaga Demokrasi</b> 	7. Pemilu yang Bebas dan Adil	2 indikator
	8. Peran DPRD	3 indikator
	9. Peran Partai Politik	2 indikator
	10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	2 indikator
	11. Peradilan yang Independen	2 indikator

## 2. Metode Pengumpulan Data Indeks Demokrasi Indonesia

Data yang dikumpulkan dalam kegiatan penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia secara keseluruhan mencakup dua jenis data yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif merupakan data makro yang dikumpulkan melalui kegiatan analisis berita surat kabar dan analisis dokumen kebijakan dengan menggunakan instrumen terstruktur berupa kuesioner. Analisis berita surat kabar dilakukan terhadap muatan surat kabar terpilih di ibu kota provinsi. Analisis dokumen kebijakan publik dilakukan terhadap peraturan daerah (perda), surat-surat keputusan, surat edaran dan peraturan-peraturan daerah lainnya.

Pengumpulan data kualitatif dalam kegiatan ini dilakukan melalui penggalian informasi baik yang bersifat *exploratory* maupun *explanatory* dengan metode, yaitu:

- a. *Focus Group Discussion* dilaksanakan untuk memverifikasi, baik secara *explanatory* maupun *exploratory*, hasil-hasil atau temuan dari analisis surat kabar maupun analisis dokumen.

b. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali keterangan yang lebih mendalam dari sumber-sumber terpercaya guna lebih meyakinkan hasil dari *Focus Group Discussion*.

Berbeda dengan pelaksanaan wawancara yang biasa dilakukan pada kegiatan survei, pelaksanaan wawancara mendalam dalam rangka pengumpulan data kualitatif dilakukan tanpa menggunakan kuesioner. Instrumen yang disertakan dalam wawancara mendalam atau FGD hanya berupa *hand-out* yang berisi daftar variabel yang akan diteliti.

**Diagram 1.**  
**Metoda Pengumpulan data IDI**



### 3. Makna Nilai IDI

Indeks Demokrasi Indonesia memiliki rentang nilai dari 0 - 100, dimana semakin mendekati angka 100 tingkat pelaksanaan demokrasi semakin baik.

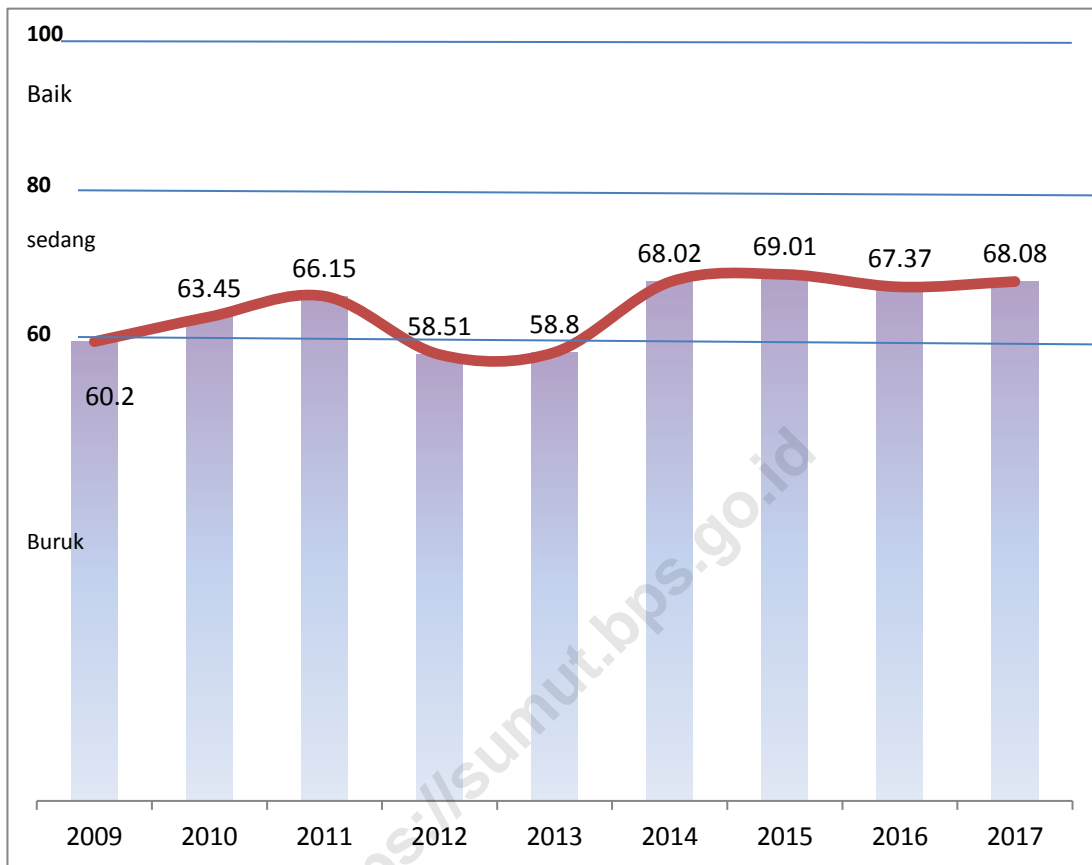
Indeks	Makna
< 60	KINERJA DEMOKRASI BURUK
60 – 80	KINERJA DEMOKRASI SEDANG
> 80	KINERJA DEMOKRASI BAIK

### 4. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Utara 2009 - 2017

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Utara tahun 2017 mencapai **68,08** dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan IDI 2016 yaitu 67,37. Meskipun sedikit mengalami perubahan, tingkat demokrasi di Sumatera Utara tersebut masih termasuk dalam kategori “sedang”.

Capaian IDI dari tahun 2009 hingga 2017 mengalami fluktuasi. Pada awal mula dihitung tahun 2009, capaian IDI Sumatera Utara hanya sebesar 60,20. Angka ini terus mengalami perubahan hingga mencapai momen tertingginya pada tahun 2015 sebesar 69,01; walaupun pada akhirnya kembali turun menjadi 67,37 di tahun 2016, dan kembali naik sedikit sebesar 0,71 di tahun 2017

**Grafik 1. Perkembangan IDI Sumatera Utara, 2009-2017**



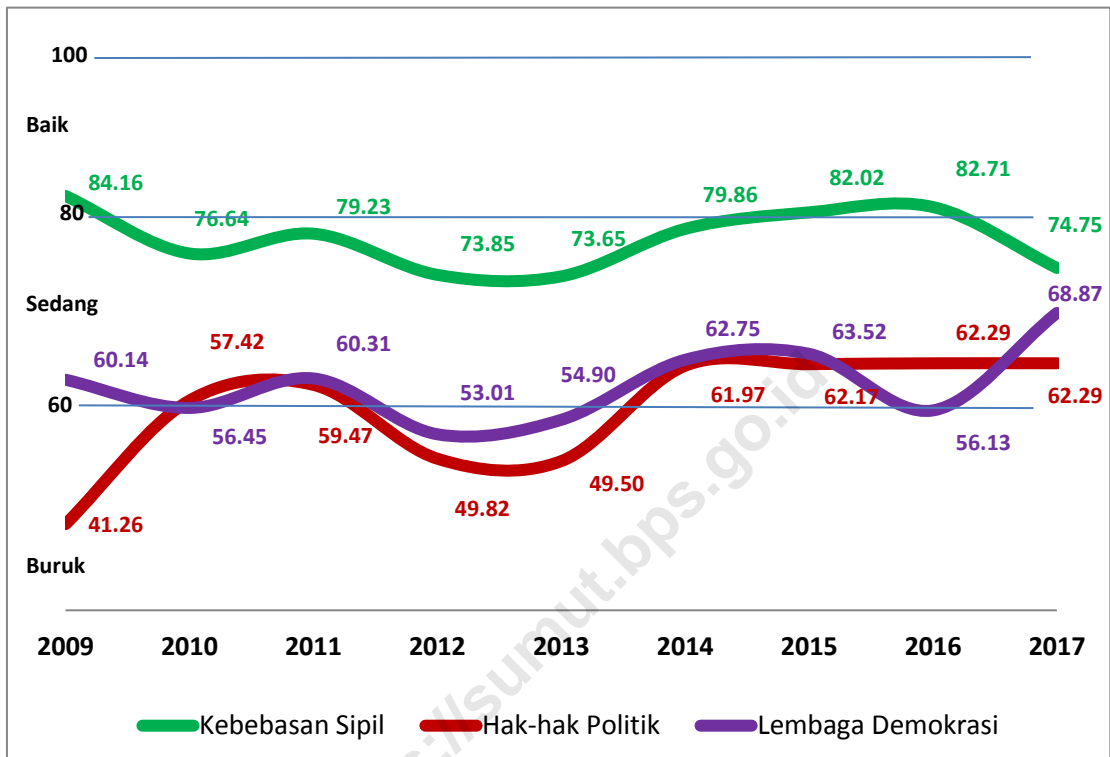
Bila dibandingkan dengan angka nasional, angka IDI Sumut masih jauh dibawah, IDI nasional mencapai 72,11. Sedangkan jika dibandingkan dengan antar provinsi IDI terendah ada di Prov. Papua sebesar 54,41 tertinggi ada di Prov. D.I Yogyakarta sebesar 85,32

## **5. Perkembangan Indeks Aspek IDI Sumatera Utara 2009 - 2017**

Angka IDI Sumatera Utara 2017 merupakan indeks komposit yang disusun dari skor beberapa aspek yakni aspek Kebebasan Sipil dengan rata-rata 74,75; aspek Hak-Hak Politik sebesar 62,29; dan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 68,87.



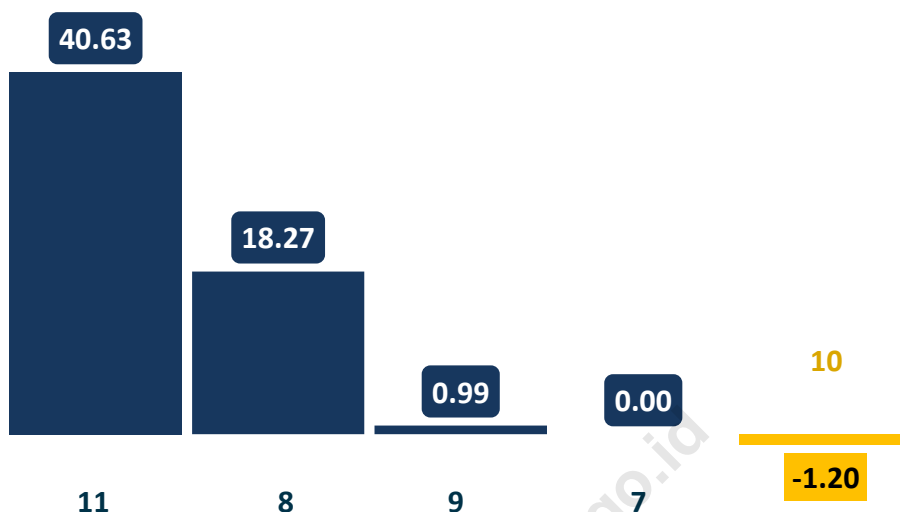
**Grafik 2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Sumatera Utara, 2009-2017**



Seluruh Aspek IDI Sumatera Utara 2017 masuk pada kategori sedang, dimana Aspek Lembaga Demokrasi mengalami peningkatan yang cukup tajam. Naik 12,74 Point dari 56,13 pada 2016 menjadi 68,87 pada 2017

Tajamnya kenaikan Aspek Lembaga Demokrasi ini akibat naiknya Variabel Peran Peradilan yang Independen sebesar 46,63 poin dari sebelumnya 50,00 point menjadi 96,63 poin. Kenaikan lain juga di sumbang dari Variabel Peran DPRD naik menjadi 18,26 poin dari 21,85 poin menjadi 40,11. Dengan kenaikan ini Aspek Lembaga Demokrasi menjadi berkatagori Sedang dari sebelumnya berkatagori Buruk.

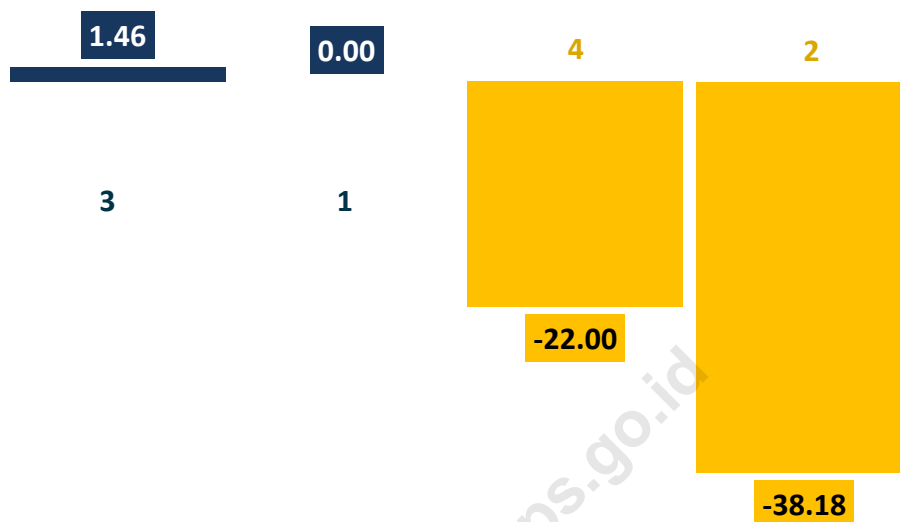
**Grafik 3 Perubahan Indeks Variabel Aspek Lembaga Demokrasi IDI Sumatera Utara  
2017 dibanding 2016**



NAMA VARIABEL	
11	Peran Peradilan yang Independen
8	Peran DPRD
9	Peran Partai Politik
7	Pemilu yang Bebas dan Adil
10	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah

Aspek Kebebasan Sipil mengalami penurunan 7,96 poin dari 82,71 poin pada 2016 menjadi 74,75 poin pada 2017. Penurunan Nilai pada Aspek Kebebasan Sipil disebabkan oleh Variabel Kebebasan berpendapat mengalami penurunan cukup tinggi 38,18 poin. Sebelumnya 86,12 menjadi 64,93 poin. Dan Variabel Kebebasan dari diskriminasi turun 22,00 poin dari 86,93 poin pada 2016 menjadi 64,93. Dengan penurunan ini Aspek Kebebasan Sipil kembali menjadi katagori Sedang dimana sebelumnya berkatagori Baik

**Grafik 4 Perubahan Indeks Variabel Aspek Kebebasan Sipil IDI Sumatera Utara 2017 dibanding 2016**



NAMA VARIABEL	
3	Kebebasan Berkeyakinan
1	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
4	Kebebasan dari Diskriminasi
2	Kebebasan Berpendapat

Aspek Hak-Hak Politik tidak mengalami perubahan tetap sebesar 62,29 poin. Aspek Hak hak politik disusun dari variabel hak memilih dan dipilih, Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan keputusan dan Pengawasan, serta Variabel Pemilu yang bebas dan adil.

Variabel Hak memilih dan dipilih, dan Variabel Pemilu yang bebas dan adil di hitung berdasarkan hasil Pileg, oleh karena itu variabel ini tidak berubah sebelum ada pileg yang baru, sehingga variabel yang diukur hanyalah Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan.

**Grafik 5 Perubahan Indeks Variabel Aspek Hak Hak Politik IDI Sumatera Utara 2017  
dibanding 2016**



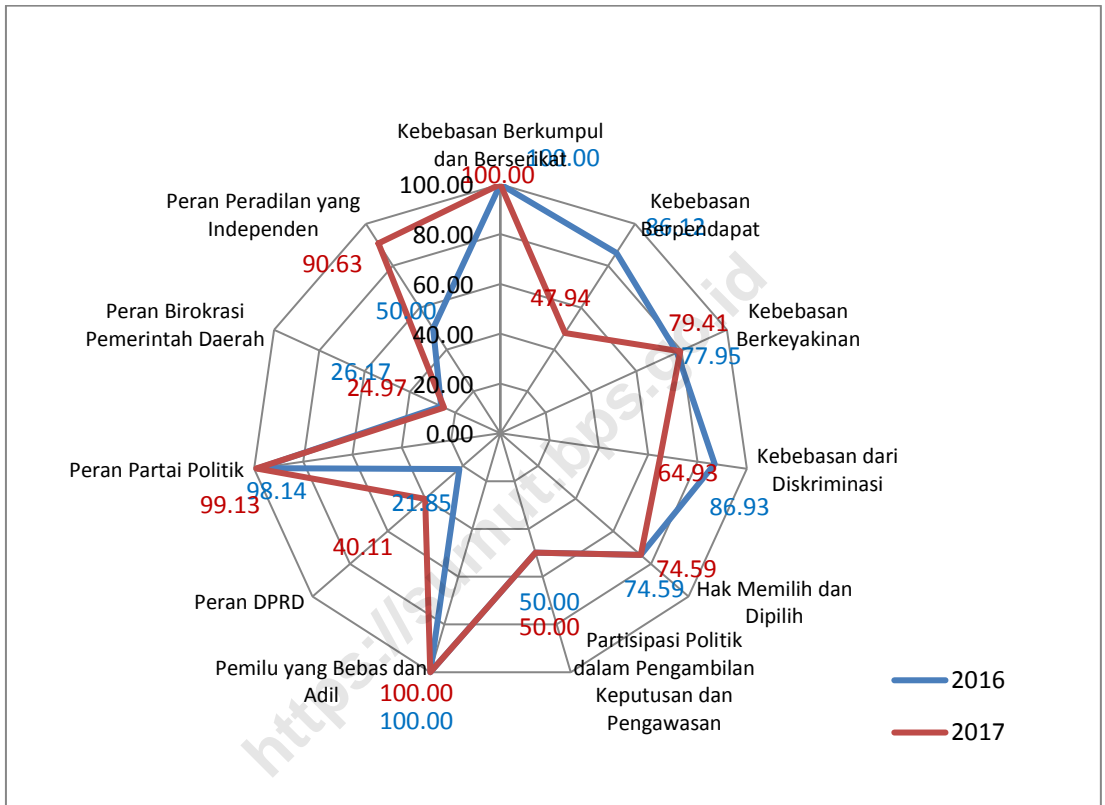
NAMA VARIABEL	
5	Hak Memilih dan Dipilih
6	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan

**6. Perkembangan Indeks Variabel IDI Sumatera Utara 2016-2017**

Pada tahun 2017 terdapat tiga variabel yang mengalami penurunan indeks dan empat variabel yang mengalami peningkatan, serta empat variabel tidak mengalami perubahan. Dari tiga variabel yang mengalami penurunan, dua di antaranya menurun cukup tajam. Variabel Kebebasan Berpendapat menurun paling tajam yaitu sebesar 38,18 poin, dari 86,12 pada 2016 menjadi 47,94 pada 2017. Penurunan terbesar kedua terjadi pada variabel Kebebasan dari Deskriminasi yang turun 22,00 poin, dari 86,93 pada 2016 menjadi 64,93 pada 2017. Penurunan lainnya terjadi pada variabel Peran Birokrasi Pemerintah daerah 1,20 poin dari 26,17 pada 2016 menjadi 24,97 pada 2016, dan masih dalam katagori Buruk.

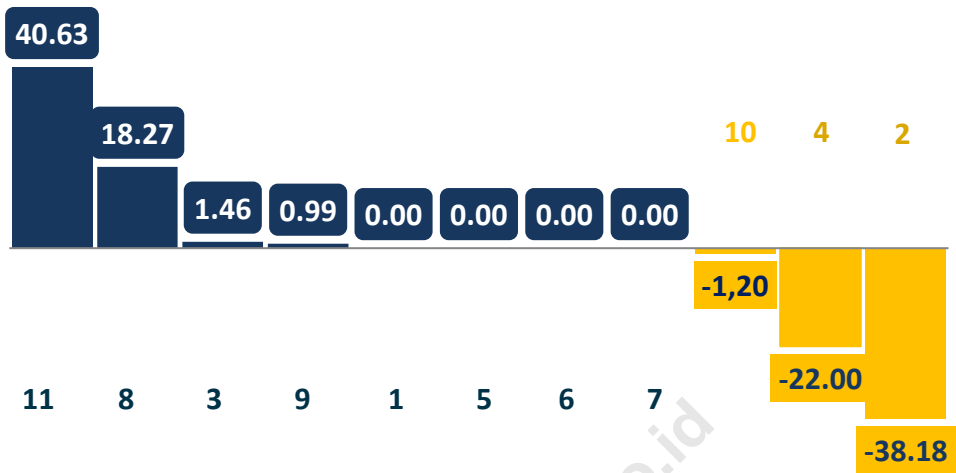
Angka perkembangan indeks variabel secara rinci dapat dilihat pada Grafik 3.

**Grafik 6. Perkembangan Indeks Variabel IDI Sumatera Utara, 2016-2017**



Di sisi lain, variabel Peran Peradilan yang Independen meningkat cukup tajam 40,63 poin, dari 50,00 pada 2016 menjadi 90,63 pada 2017. Variabel Peran DPRD mengalami kenaikan cukup berarti 7,45 poin dari 21,85 poin pada 2016 menjadi 29,30 poin pada 2017. Variabel lain yang juga meningkat tipis adalah variabel Kebebasan Berkeyakinan 1,46 poin dari 77,95 pada 2016 menjadi 79,41 pada 2017. Variabel Peran Partai Politik yang naik 0,99 poin, dari 98,14 pada 2016 menjadi 98,13 pada 2017 dan masih tetap pada katagori Baik.

Grafik 7 Perubahan Indeks Variabel IDI Sumatera Utara 2017 dibanding 2016



NAMA VARIABEL	
11	Peran Peradilan yang Independen
8	Peran DPRD
3	Kebebasan Berkeyakinan
9	Peran Partai Politik
1	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
5	Hak Memilih dan Dipilih
6	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan
7	Pemilu yang Bebas dan Adil
10	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
4	Kebebasan dari Diskriminasi
2	Kebebasan Berpendapat

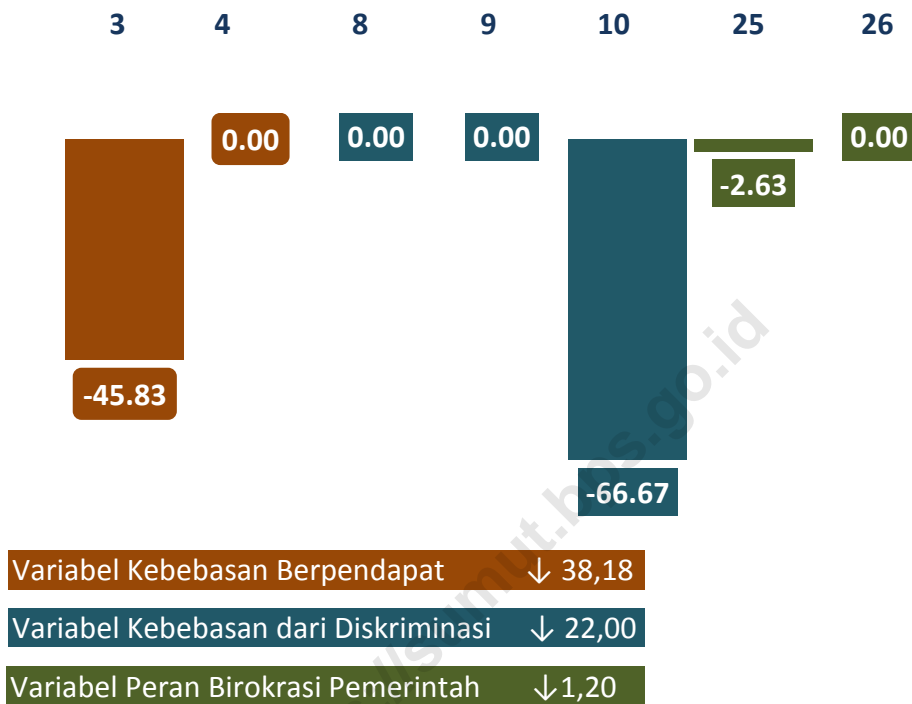
### a. Indeks Variabel yang Turun

Variabel Kebebasan Berpendapat menurun paling tajam yaitu sebesar 38,18 poin. Penurunan yang terjadi pada variabel ini disebabkan oleh indikator Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghalangi kebebasan berpendapat turun 45,83 poin dari 83,33 pada 2016 menjadi 37,50 pada 2017, tergolong dalam katagori Buruk.

Penurunan terbesar kedua terjadi pada variabel Kebebasan dari Diskriminasi yang turun 22,00 poin. Penurunan ini terjadi pada indikator Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau kelompok rentan lainnya 66,67 poin dari 100 poin pada 2016 menjadi 33,33 poin pada 2017. Langsung turun pada katagori Buruk

Penurunan lainnya terjadi pada variabel Peran Birokrasi Pemerintah daerah 1,20 poin. Penurunan ini disebabkan oleh indikator Jumlah kebijakan Pejabat Pemerintah daerah yang Dinyatakan Bersalah oleh Putusan PTUN 2,63 poin dari 47,37 poin pada 2016 menjadi 44,74 pada 2017.

**Grafik 8 : Perubahan Indeks Indikator menurut Variabel yang Mengalami Penurunan dibanding 2016 pada IDI Sumatera Utara 2017**



NAMA INDIKATOR	
3	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat
4	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya
9	Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya
10	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya
25	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN
26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah



### **a. Indeks Variabel yang Naik**

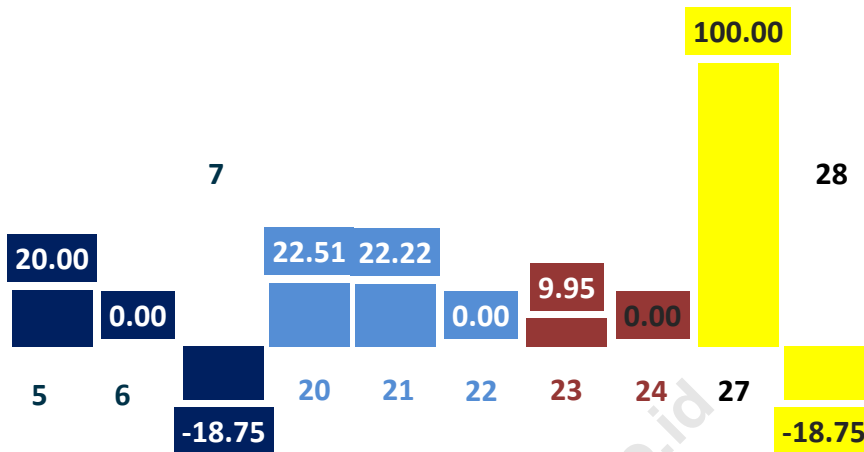
Di sisi lain, variabel Peran Peradilan yang Independen meningkat cukup tajam 40,63 poin, dari 50,00 pada 2016 menjadi 90,63 pada 2017. Peningkatan ini disumbang oleh indikator Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi 100 poin dari sebelumnya 0 poin pada tahun 2016 menjadi 100 poin pada tahun 2017.

Variabel Peran DPRD mengalami kenaikan cukup berarti 7,45 poin dari 21,85 poin pada 2016 menjadi 29,30 poin pada 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh indikator Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan sebesar 22,00 poin dari 0 poin pada 2016 menjadi 22,00 poin pada 2017. Indikator alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD mengalami kenaikan 6,15 poin dari 31,1 pada 2016 menjadi 37,25 pada 2017.

Variabel lain yang juga meningkat tipis adalah variabel Kebebasan Berkeyakinan 1,46 poin dari 77,95 pada 2016 menjadi 79,41 pada 2017. Pada Variabel ini ada dua indikator yang mengalami perubahan. Indikator Ancaman kekerasan atau pengguna kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama naik 20,00 poin, dari 80 poin pada 2016 menjadi 100 poin pada 2017. Sebaliknya Indikator Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya turun 18,75 poin dari 100 poin 2016 menjadi 81,25 poin pada 2017

Variabel Peran Partai Politik yang naik 0,99 poin, dari 98,14 pada 2016 menjadi 98,13 pada 2017 dan masih tetap pada katagori Baik. Kenaikan ini ada pada indikator Persentase Perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi 18,26 poin dari 81,36 poin pada 2016 menjadi 91,31 pada 2017

**Grafik 9 : Perubahan Indeks Indikator menurut Variabel yang Mengalami Peningkatan dibanding 2016 pada IDI Sumatera Utara 2017**



- 3. Variabel Kebebasan Berkeyakinan ↑ 1,46
- 8. Variabel Peran DPRD ↑ 18,27
- 9. Variabel Peran Partai Politik ↑ 0,99
- 11. Variabel Peran Peradilan Yang independen ↑ 40,63

NAMA INDIKATOR			
5	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu	22	Rekomendasi DPRD kepada eksekutif
6	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan	23	Perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi
7	Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi	24	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu
20	Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan	27	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi
21	Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD	28	Keputusan hakim yang kontroversial

## **7. Perkembangan Skor Indikator IDI Sumatera Utara 2016 - 2017**

### **7.1 Perkembangan skor indikator pada Aspek Kebebasan Sipil**

Capaian Nilai Indeks Aspek Kebebasan Sipil pada IDI Sumatera Utara 2017 sebesar 74,75 poin, menurun sebesar 7,96 poin disebabkan ada tiga indikator pada Aspek ini yang mengalami penurunan cukup besar yaitu indikator 6, 3, dan 10.

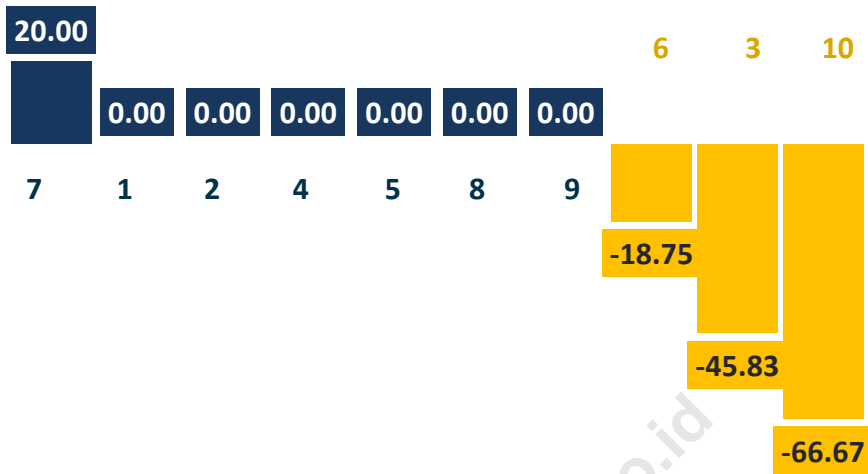
Indikator 6 turun 18,75 poin dari 100 poin pada 2016 menjadi 81,25 poin pada 2017. Hal ini disebabkan ada masukan dari para peserta FGD tentang indikator ini.

Indikator 3 turun 45,83 poin dari 83,33 poin pada 2016 menjadi 37,50 poin pada 2017. Hal ini disebabkan masih ada aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat seperti ancaman terhadap jurnalis dalam meliput berita dan dalam memberitakan sesuatu yang masih dalam kaedah jurnalis yang tidak bertentangan dengan hukum, dihambat diancam bahkan diintimidasi. Selama 2017 ada 3 kejadian dan jumlahnya meningkat dari tahun 2016.

Indikator 7 naik 20 poin dari 80 poin pada 2016 menjadi 100 poin pada 2017, hal ini disebabkan tidak ada lagi kejadian kekerasan oleh sekelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lainnya terkait ajaran agama.

Sementara yang lainnya tetap tidak mengalami perubahan yaitu indikator 1,2,4,5,8 dan 9.

**Grafik 10 Perubahan Indeks Indikator Aspek Kebebasan Sipil IDI Sumatera Utara  
2017 dibanding 2016**



NAMA INDIKATOR	
7	Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama
1	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
2	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
4	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok
9	Tindakan/ Pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok
6	Tindakan/ pernyataan pejabat yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama
3	Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat
10	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, kelompok

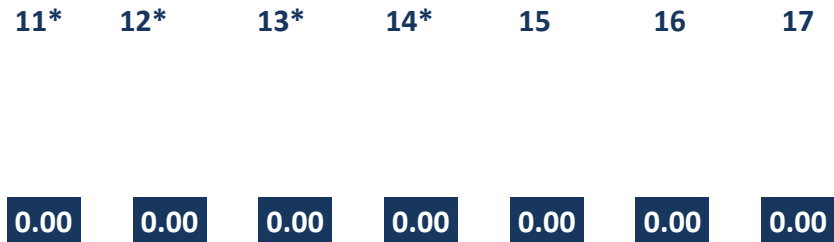
## 7.2 Perkembangan skor indikator pada Aspek Hak Hak Politik

Capaian Nilai Indeks Aspek Hak hak Politik pada IDI Sumatera Utara 2017 tetap tidak mengalami perubahan sebesar 62,29 poin. Tidak berubahnya Aspek ini disebabkan sebahagian besar indikatornya yaitu indikator 11,12,13,14 dihitung pada pelaksanaan Pileg terakhir yaitu Pileg 2014, artinya inidikator ini nilainya tetap selama 5 tahun. Indikator 15 Jumlah perempuan terpilih di DPRD Provinsi. Komposisi Jumlah Anggota DPRD Provinsi Sumut menurut jenis kelamin cenderung tetap pada setiap tahunnya, kecuali ada pergantian PAW dengan pengganti yang berbeda jenis kelaminnya, sehingga mengakibatkan perubahan komposisi jumlah anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara menurut jenis kelamin, dan dapat merubah nilai pada indikator ini.

Indikator 16 sejak tahun 2012 sampai 2017 tidak pernah naik dari 0 poin. Hal ini disebabkan jumlah demonstrasi yang bersifat kekerasan di Sumatera Utara masih menempatkan posisi tertinggi di Indonesia sehingga menyebabkan indikator ini selalu mendapat 0 poin.

Indikator 17 sejak tahun 2011 sampai 2017 selalu berada pada katagori baik, mendapat poin 100, hanya pada tahun 2013 mendapat poin 98,72 poin. Indikator ini merupakan peran partisipasi masyarakat dalam menyuarakan hak haknya untuk mengkritik kinerja pemerintah, agar pemerintah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kritik terhadap kinerja pemerintah ini dilakukan oleh masyarakat dalam jalur yang benar, dan tidak bertentangan dengan hukum.

**Grafik 11 Perubahan Indeks Indikator Aspek Hak Hak Politik IDI Sumatera Utara  
2017 dibanding 2016**



**Keterangan:**

*\*) Indikator 11-14 tidak mengalami perubahan karena terkait dengan pemilu*

NAMA INDIKATOR	
11	Hak memilih atau dipilih terhambat
12	Ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih
13	Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)
14	<i>Voters turnout</i>
15	Persentase anggota perempuan DPRD provinsi
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan
17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan

### 7.3 Perkembangan skor indikator pada Aspek Lembaga Demokrasi

Capaian Nilai Indeks Aspek Lembaga Demokrasi pada IDI Sumatera Utara naik 12,74 poin dari 56,13 pada 2016 menjadi 68,87 di 2017. Kenaikan ini diperoleh dari 4 indikator yang naik yaitu indikator 28,20,21,dan 24; dua indikator yang turun yaitu indikator 25 dan 27; serta 5 indikator lainnya yang tidak berubah yaitu indikator 18,19,22,23, dan 26.

Kenaikan yang terbesar pada indikator 28 naik 100 poin, ini disebabkan tidak ada ditemukan kejadian penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi. Kejadian kontroversial adalah kejadian yang bertentangan dengan prinsip keadilan yang berlaku bagi masyarakat umum, jadi dalam hal ini bukan yang bertentangan dengan pihak pihak yang berperkara.

Indikator 20 naik 22,51 poin dari 31,10 pada 2016 menjadi 53,61 pada 2017. Kenaikan pada besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan ini disebabkan oleh berubahnya pengalokasian dana APBD untuk Sekolah Menengah Tingkat Atas pada Dinas Pendidikan yang sebelumnya alokasi APBD ada pada Pemerintah Kab/ Kota masing masing, saat ini sudah menjadi tanggungjawab dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Perubahan ini mengakibatkan alokasi dana untuk urusan pendidikan pada PAPBD Sumatera Utara menjadi 42,67%.

Indikator 21 naik 22,22 poin dari 0 pada 2016 menjadi 22,22 pada 2017 disebabkan adanya kenaikan kinerja dari DPRD Provinsi Sumatera Utara. Tahun 2016 tidak ada satupun Perda Inisiatif yang diterbitkan oleh DPRD Sumatera Utara, namun pada tahun 2017 terdapat 2 Perda Inisiatif yang dibuat oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Indikator 24 naik 9,95 poin dari 81,36 pada 2016 menjadi 91,31 pada 2017. Sesuai dengan amanat undang undang tentang keterwakilan perempuan di lembaga legeslatif yaitu sebanyak 30%. Untuk itu peran perempuan dalam kepengurusan partai politik tingkat provinsi juga diarahkan ke angka 30 persen tersebut. Pada 2017 persentase perempuan pada kepengurusan partai politik sebesar 24,41% sehingga memperoleh 91,31 poin. Partai Politik yang dimaksud disini adalah 3 partai politik terbesar perolehan suara dalam Pileg terakhir yaitu 2014.

Indikator 27 turun 18,75 poin dari 100 pada 2016 menjadi 81.25 pada 2017. Penurunan ini disebabkan adanya satu kejadian.

Indikator 25 turun 2,63 poin dari 47,37 pada 2016 menjadi 44,74 poin pada 2017. Indikator ini adalah jumlah kejadian dimana kebijakan pejabat pemerintah daerah digugat oleh masyarakat melalui PTUN, yang mana oleh PTUN diputuskan dan dinyatakan bersalah. Yang di maksud Pemerintah Daerah pada indikator ini adalah Pemerintah Daerah Tingkat I maupun TK II atau Lembaga Negara Pusat yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Turunnya poin pada indikator ini disebabkan meningkatnya jumlah putusan yang dinyatakan bersalah terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Oleh PTUN selama 2017.

Indikator 18,19 tetap tidak mengalami perubahan. Indikator ini merupakan indikator yang di hitung lima tahunan yaitu pada waktu pemilihan legeslatif terjadi.

Indikator 22 adalah rekomendasi DPRD terhadap Eksekutif. Indikator ini tetap pada 7,14 poin. Rekomendasi yang dimaksud adalah yang tercatat dalam Surat Keputusan oleh Pimpinan Dewan.

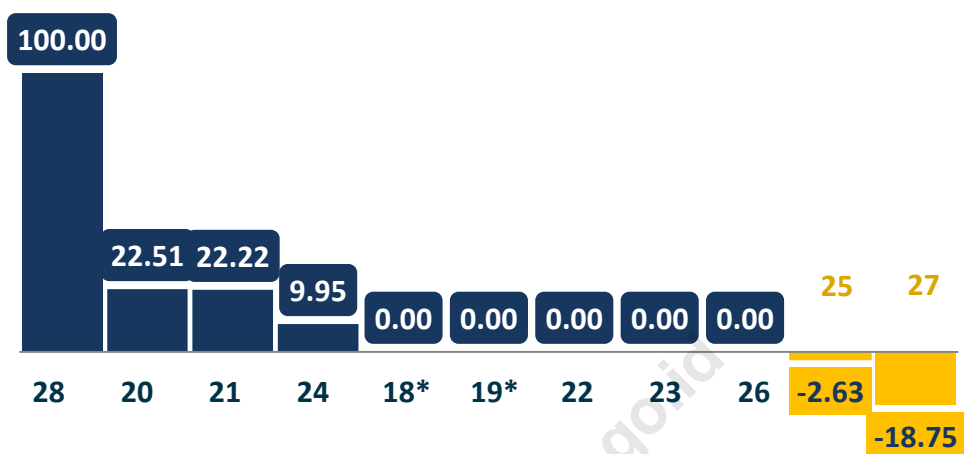
Indikator 23 adalah Kegiatan Kaderisasi yang dilakukan oleh Peserta Pemilu. Indikator ini tetap bernilai 100 poin, artinya kegiatan kaderisasi yang dilakukan oleh Parpol peserta pemilu 2014 telah berjalan dengan baik, dimana dari laporan yang tercatat di Badan Kesbangpolinmas Provinsi Sumatera Utara, rata rata kegiatan kaderisasi dilakukan oleh parpol peserta pemilu 2014. Dan terekam oleh koran sebanyak 3 kali.

Indikator 26 adalah upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah. Dalam rangka mendorong daerah untuk menyelenggarakan transparansi Anggaran, Kemendagri telah mengeluarkan instruksi Kemendagri No . 188.52/1797/SC/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD). Instruksi tersebut ditujukan kpd gubernur seluruh Indonesia guna pelaksanaan TPAD. Instruksi. Pemerintah provinsi juga wajib mempublikasikan data mutakhir pada menu content yang terdiri dari 12 item. Untuk provinsi Sumatera Utara melalui web site PPID Pemerinta Provinsi Sumatera Utara belum melaksanakannya

....



**Grafik 12 Perubahan Indeks Indikator Aspek Lembaga Demokrasi IDI Sumatera Utara 2017 dibanding 2016**



**Keterangan:**

\*) Indikator 18-19 tidak mengalami perubahan karena terkait dengan pemilu

NAMA INDIKATOR	
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi
20	Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan
21	Perda yang merupakan inisiatif DPRD
24	Persentase perempuan pengurus partai politik
18	Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu
19	Kecurangan dalam penghitungan suara
22	Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu
26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah
25	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN
27	Keputusan hakim yang kontroversial

## 8. Capaian Skor Indikator IDI Sumatera Utara 2017

### 8.1 indikator yang mencapai kinerja kategori “baik” (skor di atas 80)

Terdapat 14 indikator yang mencapai kinerja kategori “baik” (skor di atas 80), meliputi:

- a. 9 Indikator yang tidak mengalami perubahan poin pada 2016 maupun 2017
  - Indikator 1, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Pemerintah yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat,
  - Indikator 2, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat,
  - Indikator 4, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berpendapat,
  - Indikator 9, Tindakan/Pernyataan Pejabat yang Diskriminatif dalam Hal Gender, Etnis, dan Kelompok,
  - Indikator 11, Hak Memilih atau Dipilih Terhambat,
  - Indikator 17, Pengaduan Masyarakat mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan,
  - Indikator 18, Keberpihakan KPUD dalam Penyelenggaraan Pemilu,
  - Indikator 19, Kecurangan dalam Penghitungan Suara,
  - Indikator 23, Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan Parpol Peserta Pemilu,Kesembilan indikator ini tetap mendapat 100 poin pada 2016 dan 2017
- b. 2 Indikator yang mengalami kenaikan poin pada 2017
  - ① Indikator 7, Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama. Mengalami kenaikan 20 poin dari 80 pada 2016 menjadi 100 poin pada 2017. Kenaikan ini disebabkan tidak ditemukan kejadian tersebut pada 2017 dimana sebelumnya ada 2 kejadian
  - ① Indikator 28, Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi. Mengalami kenaikan 100 poin. Kenaikan ini disebabkan tidak ditemukannya kejadian tersebut pada 2017 dimana sebelumnya di temukan 1 kejadian
- c. 3 Indikator yang mengalami penurunan poin pada 2017
  - ① Indikator 6, Tindakan/Pernyataan Pejabat yang Membatasi Kebebasan Menjalankan Ibadah Agama, Turun 18,75 poin dari 100 poin tahun 2016 menjadi 81,25 poin tahun 2017.
  - ① Indikator 24, Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik, turun 1,36 poin dari 81,36 pada 2016 menjadi 80,00 pada 2017.
  - ① Indikator 27, Keputusan Hakim yang Kontroversial, turun 18,75 poin dari 100 pada 2016 menjadi 81,25 pada 2017

## 8.2 indikator dengan capaian kinerja kategori “sedang” (skor di atas 60 – dibawah 80)

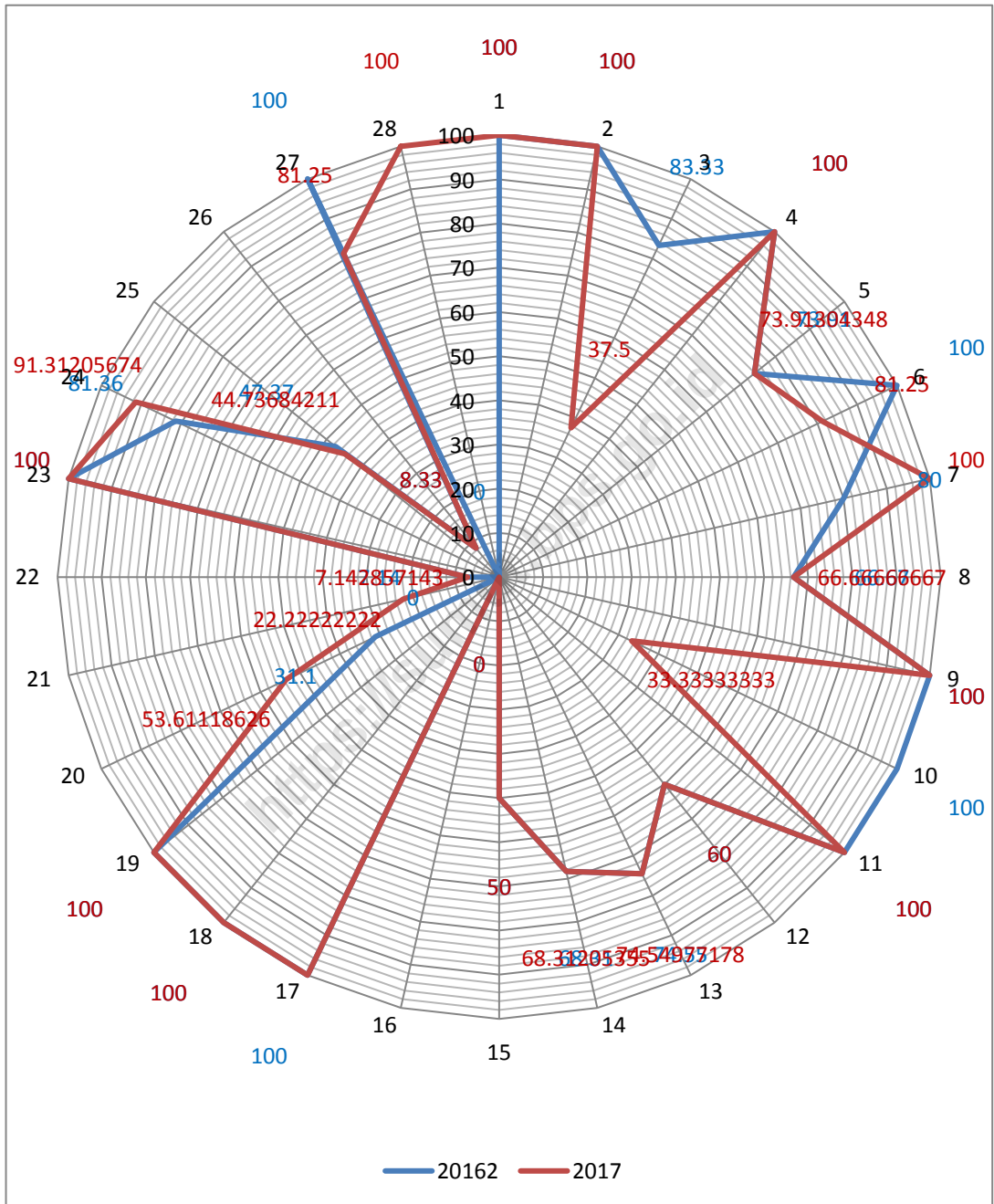
Terdapat 5 indikator yang mencapai kinerja kategori “sedang” yaitu indikator 13, 5, 14, 8, 12. Dan kelima indikator ini tidak mengalami perubahan dari 2016 ke 2017

## 8.3 indikator dengan capaian kinerja kategori “buruk” (skor di bawah 60)

Terdapat 9 indikator yang termasuk dalam kategori buruk.

- a. 4 Indikator yang tidak mengalami perubahan pada 2017
  - Indikator 15, Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD Provinsi,
  - Indikator 16, Demonstrasi/Mogok yang Bersifat Kekerasan,
  - Indikator 22, Rekomendasi DPRD Kepada Eksekutif,
  - Indikator 26, Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah, dan
- b. Dua Indikator yang mengalami kenaikan pada 2017
  - 🕒 Indikator 20, Besaran Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan,
  - 🕒 Indikator 21, Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD,
- c. Tiga Indikator yang mengalami penurunan pada 2017
  - 🕒 Indikator 3, Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat. Turun 45,83 poin dari 83,33 pada 2016 menjadi 37,50 pada 2017.
  - 🕒 Indikator 10, Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya. Turun 46,67 poin dari 100 pada 2016 menjadi 33,33 pada 2017.
  - 🕒 Indikator 25, Kebijakan Pejabat Pemerintah Daerah yang Dinyatakan Bersalah oleh Keputusan PTUN. Turun 2,63 point dari 47,37 point pada 2016 menjadi 44,74 point pada 2017.

Grafik 13. Nilai Skor Indikator IDI Sumatera Utara 2016 - 2017



# LAMPIRAN

<https://surveypops.go.id>

**Tabel 1. Perkembangan Indeks Variabel IDI Sumatera Utara, 2009-2017**

Nama Variabel	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	100	98,75	96,88	53,13	96,88	100	88,28	100	100
2 Kebebasan Berpendapat	55,55	13,88	69,42	41,65	69,42	55,53	72,23	86,12	47,94
3 Kebebasan Berkeyakinan	86,43	86,43	77,95	77,95	65,55	77,95	78,02	77,95	79,41
4 Kebebasan dari Diskriminasi	84,15	86,93	79,98	83,63	86,93	86,93	93,38	86,93	64,93
5 Hak Memilih dan Dipilih	49,37	49,32	49,37	49,64	49,64	73,95	74,34	74,59	74,59
6 Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	33,15	65,51	69,57	50,00	49,36	50,00	50,00	50,00	50,00
7 Pemilu yang Bebas dan Adil	25,43	25,43	25,43	25,43	25,43	100	100	100	100
8 Peran DPRD	49,31	30,66	33,10	24,13	21,62	28,94	19,11	21,85	40,11
9 Peran Partai Politik	15,81	14,70	31,85	32,58	15,87	82,78	96,06	98,14	99,13
10 Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	92,27	92,27	92,27	92,27	92,27	100	37,91	26,17	24,97
11 Peran Peradilan yang Independen	100	100	100	75,00	100	12,50	75,00	50,00	90,63

Tabel 2. Perkembangan Skor Indikator untuk Variabel Kebebasan Sipil IDI Sumatera Utara, 2009 - 2017

	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100	100	100	50,00	100	100	100	100	100
2	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100	90,00	75,00	75,00	75,00	100	6,25	100	100
3	Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	56,67	16,67	83,33	50,00	83,33	66,67	66,67	83,33	37,50
4	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	100
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	86,96	78,26	73,91	73,91	69,57	73,91	73,91	73,91	73,91
6	Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	77,50	100	100	100	65,00	100	100	100	81,25
7	Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama	90,00	70,00	80,00	80,00	50,00	80,00	80,00	80,00	100
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	83,33	66,67	66,67
9	Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender dst	90,00	100	75,00	100	100	100	100	100	100
10	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender	100	100	100	90,00	100	100	100	100	33,33

**Tabel 3. Perkembangan Skor Indikator untuk Variabel Hak-hak Politik IDI Sumatera Utara, 2009 - 2017**

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
11 Hak memilih atau dipilih terhambat	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	100	100	100	100
12 Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih	50	50	50	50	50	60	60	60	60
13 Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)	30	30	30	30	30	74,55	74,55	74,55	74,55
14 Voters turnout	65,35	65,35	65,35	65,35	65,35	68,31	68,31	68,31	68,31
15 % Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi	53,87	53,33	53,87	56,67	56,67	43,33	46,67	50	50
16 Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	52,17	56,52	39,13	0	0	0	0	0	0
17 Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	14,13	74,50	100	100	98,72	100	100	100	100



**Tabel 4. Perkembangan Skor Indikator untuk Variabel Lembaga Demokrasi IDI Sumatera Utara, 2009 - 2017**

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
18	Keberpakaian KPU dalam penyelenggaraan pemilu	9,09	9,09	9,09	9,09	100	100	100	100	
19	Kecurangan dalam penghitungan suara	41,77	41,77	41,77	41,77	100	100	100	100	
20	Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan	61,15	45,46	43,28	28,68	25,14	30,78	28	31,10	53,61
21	Perda yang merupakan inisiatif DPRD	21,43	0,00	25,00	25,00	15,38	42,86	0	0	22,22
22	Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif	25,00	3,57	3,57	7,14	14,29	10,71	3,57	7,14	7,14
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu	10,00	10,00	28,57	28,57	10,00	85,71	100	100	100
24	% perempuan pengurus partai politik	68,07	56,98	61,32	68,66	68,66	56,33	60,58	81,36	91,31
25	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN (indikator baru)							63,16	47,37	44,74
	Penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan parpol (indikator lama)	95,15	95,15	95,15	95,15	100				
26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah (indikator baru)							16,67	8,33	8,33
	Keterlibatan PNS dalam kegiatan parpol peserta pemilu (indikator lama)	89,39	89,39	89,39	89,39	100				
27	Keputusan hakim yang kontroversial	100	100	100	50,00	100	25,00	50	100	81,25
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	100	100	100	100	100	0,00	100	0	100

Tabel 3. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Aspek dan Provinsi, 2016-2017

Provinsi	IDI 2016				IDI 2017			
	IDI	Aspek Kebebasan Sipil	Aspek Hak-hak Politik	Aspek Lembaga Demokrasi	IDI	Aspek Kebebasan Sipil	Aspek Hak-hak Politik	Aspek Lembaga Demokrasi
Aceh	72,48	92,92	63,94	60,33	70,93	87,27	63,94	61,47
Sumatera Utara	67,37	82,71	62,29	56,13	68,08	74,75	62,29	68,87
Sumatera Barat	54,41	51,01	54,33	58,82	69,50	61,66	61,08	92,72
Riau	71,89	71,78	77,98	62,34	73,41	82,03	66,57	73,41
Jambi	68,89	84,39	65,63	54,58	74,12	86,81	62,08	77,27
Sumatera Selatan	80,95	91,17	81,94	66,53	74,04	90,83	63,90	69,03
Bengkulu	74,23	85,14	63,84	77,01	72,73	88,51	59,42	74,03
Lampung	61,00	60,49	59,32	64,31	72,01	74,12	67,20	77,00
Kep. Bangka Belitung	83,00	87,65	81,09	80,20	80,11	83,07	82,30	72,89
Kepulauan Riau	72,84	85,43	71,28	59,48	76,33	90,84	71,45	65,82
DKI Jakarta	70,85	81,11	67,54	63,19	84,73	87,73	80,86	87,12
Jawa Barat	66,82	73,37	72,34	49,79	68,78	73,61	71,02	59,16

**Tabel 3. Lanjutan**

Provinsi	IDI 2016				IDI 2017			
	IDI	Aspek Kebebasan Sipil	Aspek Hak-hak Politik	Aspek Lembaga Demokrasi	IDI	Aspek Kebebasan Sipil	Aspek Hak-hak Politik	Aspek Lembaga Demokrasi
Jawa Tengah	66,71	66,06	67,24	66,69	70,85	69,07	67,24	78,82
D.I.Yogyakarta	85,58	90,00	81,59	86,37	83,61	93,25	82,31	73,55
Jawa Timur	72,24	73,73	76,49	63,63	70,92	78,98	60,98	76,57
Banten	71,36	83,47	68,30	60,99	73,72	85,16	63,87	74,98
Bali	78,95	96,94	69,60	71,18	78,80	95,51	66,80	76,85
Nusa Tenggara Barat	65,41	65,06	62,08	71,13	76,04	79,40	62,08	93,98
Nusa Tenggara Timur	82,49	96,25	81,68	66,46	75,51	79,69	69,75	79,39
Kalimantan Barat	75,28	83,29	75,70	64,54	79,13	97,15	76,36	60,85
Kalimantan Tengah	74,77	84,98	70,66	68,43	76,12	95,58	56,69	82,50
Kalimantan Selatan	73,43	61,04	83,58	72,89	76,25	60,16	81,09	88,79
Kalimantan Timur	73,64	78,25	78,35	60,36	72,86	83,33	67,18	68,72

**Tabel 3. Lanjutan**

Provinsi	IDI 2016				IDI 2017			
	IDI	Aspek Kebebasan Sipil	Aspek Hak-hak Politik	Aspek Lembaga Demokrasi	IDI	Aspek Kebebasan Sipil	Aspek Hak-hak Politik	Aspek Lembaga Demokrasi
Kalimantan Utara	76,98	100,00	66,64	64,48	81,06	98,57	68,54	78,93
Sulawesi Utara	76,34	96,31	70,42	60,62	75,76	90,87	72,12	62,54
Sulawesi Tengah	72,20	80,39	67,89	68,76	69,79	90,04	55,88	66,44
Sulawesi Selatan	68,53	75,54	61,51	70,86	70,79	77,48	64,58	72,23
Sulawesi Tenggara	71,13	88,07	55,51	74,66	68,51	77,66	60,49	69,74
Gorontalo	77,48	82,35	75,54	74,42	73,92	85,30	68,18	68,73
Sulawesi Barat	72,37	82,89	69,02	64,47	67,74	73,56	60,84	71,39
Maluku	78,20	87,17	76,18	70,13	77,45	81,78	74,85	76,15
Maluku Utara	73,27	92,27	61,79	67,59	70,73	90,19	65,84	54,02
Papua Barat	60,35	93,67	38,05	53,85	62,76	92,42	39,05	63,14
Papua	61,02	92,15	41,13	53,45	61,34	89,09	42,16	56,91
<b>INDONESIA</b>	<b>70,09</b>	<b>76,45</b>	<b>70,11</b>	<b>62,05</b>	<b>72,11</b>	<b>78,75</b>	<b>66,63</b>	<b>72,49</b>

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jl. Asrama No. 179 Medan 20123

Telp. : (061) 8452343, Fax. : (061) 8452773

Homepage : <http://sumut.bps.go.id> E-mail : [bps1200@bps.go.id](mailto:bps1200@bps.go.id)

ISSN: 2620-5696



9 772620 569007